



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 3 Februari 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH KONSTITUSI
UNIT KERJA : HAKIM KONSTITUSI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **ARIEF HIDAYAT**
2. Jabatan : **HAKIM KONSTITUSI**
3. NHK : **84954**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. **5.746.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 192 m2/112 m2 di SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 952.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 192 m2/70 m2 di SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 847.000.000
3. Tanah Seluas 192 m2 di SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 672.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 252 m2/150 m2 di SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 1.775.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 151 m2/130 m2 di SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. **3.100.000.000**

1. MOBIL, MERCEDES BENZ SEDAN Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
2. MOBIL, JEEP WRANGLER RUBICON JEEP Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 750.000.000
3. MOBIL, TOYOTA APLHARD 2.5G A/T Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000
4. MOBIL, LEXUS SUV RX300 Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 1.250.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. **525.000.000**

D. SURAT BERTHARGA Rp. **---**

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. **775.649.424**

F. HARTA LAINNYA Rp. **---**



Sub Total	Rp.	10.146.649.424
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	10.146.649.424

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.